

BAB I

PENDAHULUAN

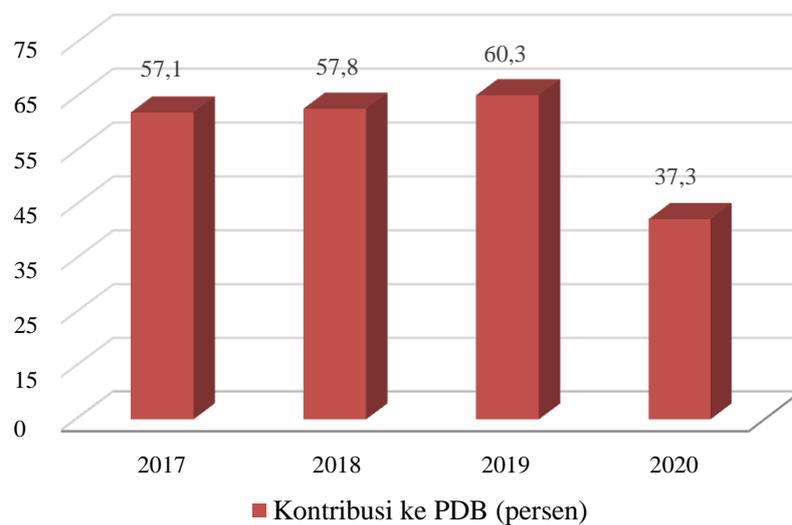
1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh suatu Negara untuk memajukan perekonomian Negara itu sendiri, baik perdagangan secara mikro maupun makro. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2019 tumbuh di bawah 5%. Sedangkan pada tahun 2020 perekonomian Indonesia turun sebesar 2,07%. Menurut kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan, dari sisi pengeluaran hampir seluruh komponen mencatatkan minus sepanjang tahun 2020. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66% terhadap PDB berkontraksi hingga 2,63%. Penurunan perekonomian Indonesia tahun 2020 disebabkan adanya dampak dari COVID-19 yang betul-betul membawa kontraksi sangat buruk.

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 merupakan upaya ekonomi produktif yang dilakukan perseorangan ataupun badan usaha dengan perbedaan kriteria kekayaan bersih yang masing-masing usaha mikro sebesar Rp 50.000.000,

usaha kecil sebesar Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000, dan usaha menengah sebesar Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000.

UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap bertahan dalam menghadapi guncangan perekonomian dunia dan kontribusinya yang cukup tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM Indonesia tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi, dan hanya UMKM yang tetap konsisten terhadap krisis, bahkan merangkak naik dari tahun sebelumnya. Tetapi berbeda dengan tahun 2020, ketika UMKM dihadapkan dengan pandemi COVID-19, UMKM tidak memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

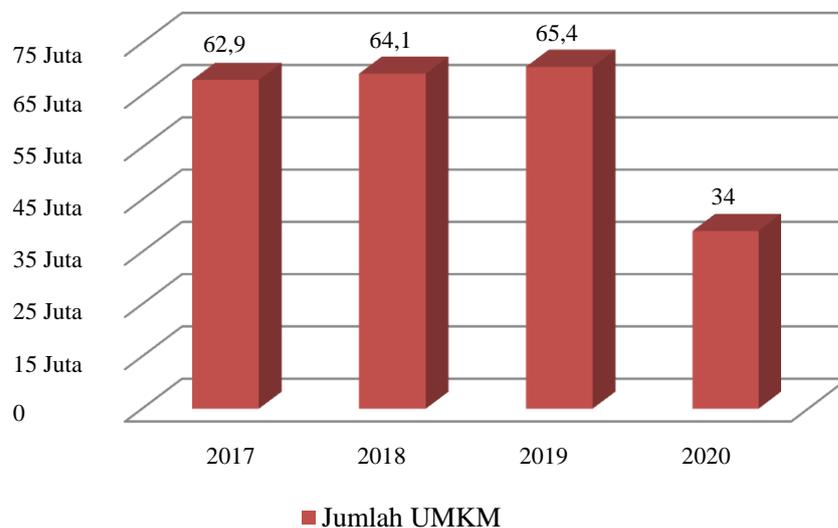


Grafik 1.1

Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2017-2020

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan grafik di atas, Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar dan selalu meningkat, tetapi pada tahun 2020 kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pada angka 37,3% terhadap PDB. UMKM belum menunjukkan performa dengan semaksimal mungkin ditambah lagi kondisi ekonomi di Indonesia yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan performa UMKM. Lanjut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang signifikan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perkembangan jumlah UMKM yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Grafik 1.2
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia
Tahun 2017-2020

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 berjumlah 62,9 juta dan terus meningkat menjadi 64,1 juta pada tahun 2018 dan 65,4 juta pada tahun 2019. Namun, jumlah UMKM pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 34 juta unit yang disebabkan adanya dampak dari pandemi COVID-19, sehingga banyak pelaku UMKM yang gagal dalam usahanya. Rendahnya pemahaman atas konsep dan produk layanan jasa keuangan, menjadikan sebagian besar UMKM belum mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga tidak jarang pula UMKM yang gagal dalam usahanya.

UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, kepemilikan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM (Aribawa, 2016).

Kinerja merupakan hasil prestasi atau hasil kerja yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta menggambarkan sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selain itu, kinerja juga menunjukkan seberapa baik perilaku para pengusaha dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja bukan hanya sekedar menilai, namun juga sebagai evaluasi untuk para pengusaha agar dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan agar lebih baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun untuk

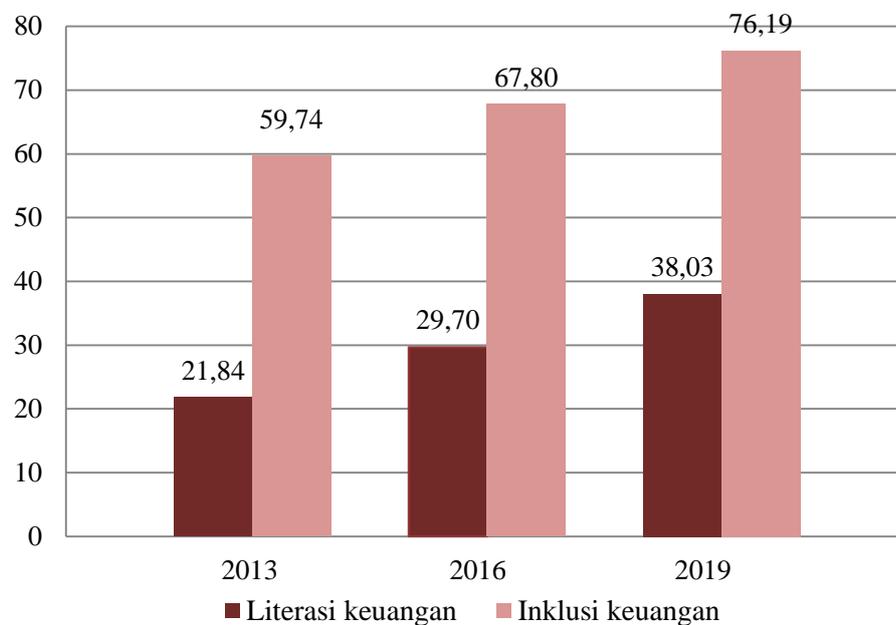
mendapatkan kinerja yang optimal tidaklah mudah, karena dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam menjalankan suatu usaha, UMKM harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi pelaku usaha. Keberhasilan dan kegagalan UMKM bergantung pada kelayakan finansial.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkonsumsi kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraannya. Literasi mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang baik bagi pemilik usaha.

Dengan demikian, tampak bahwa peningkatan literasi keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan yang diwujudkan melalui ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan serta ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat. Kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat digunakan secara optimal. Produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut

perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Menurut Soetiono dan Setiawan (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa inklusi keuangan adalah seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat di dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau.

Berikut ini adalah data perkembangan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia yang selalu mengalami perkembangan.



Grafik 1.3

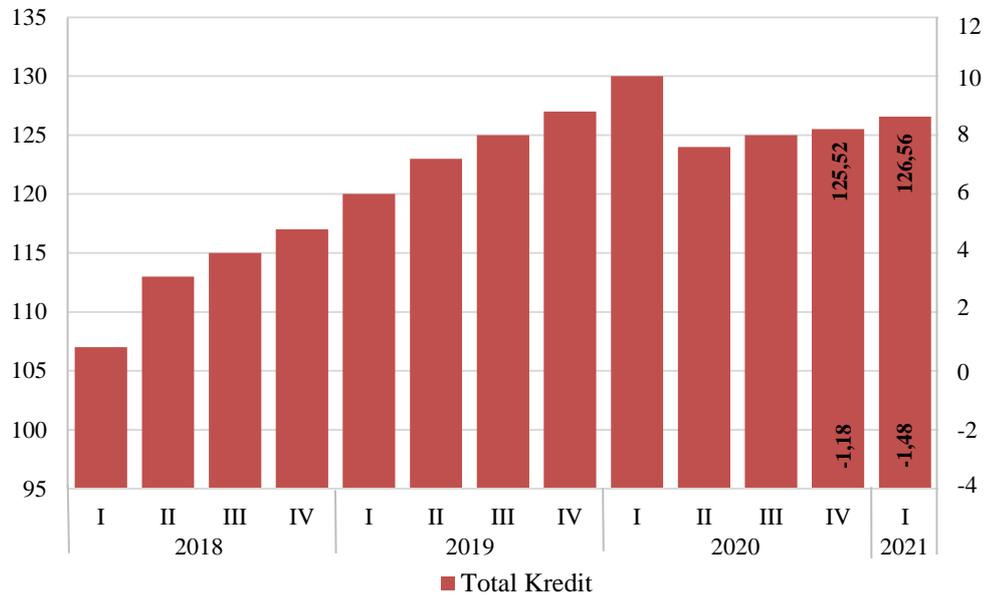
Perkembangan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Indonesia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,80%. Dalam 3 tahun

terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2020, tingkat literasi keuangan mencapai 40% dan inklusi keuangan mencapai 76%, akan tetapi tingkat inklusi keuangan yang dimiliki Indonesia diprediksi belum bisa memenuhi target dikarenakan terdapat 65 persen penduduk di Indonesia telah terkoneksi dengan internet namun akses ke layanan keuangan belum tentu dilakukan sehingga diperlukan peningkatan akses layanan.

Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kekayaan usahanya. Sementara itu, UMKM memiliki keterbatasan informasi mengenai produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pengembangan usahanya. Selain itu, diperlukan pula informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengakses pembiayaan. Berikut ini merupakan perkembangan kredit UMKM di Jawa Barat adalah sebagai berikut :



Grafik 1.4

Perkembangan Kredit UMKM di Jawa Barat

Sumber : Bank Indonesia, 2021

Penyaluran kredit UMKM masih menunjukkan penurunan sejak triwulan II 2020. Pada triwulan I 2021, pertumbuhan kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Jawa Barat masih berkontraksi sebesar -1,48% (yoy) dengan nominal kredit sebesar Rp. 126, 56 triliun. Kondisi UMKM yang terpuruk akibat pandemi masih memerlukan waktu untuk kembali pulih, sehingga kinerja penyaluran kredit perbankan masih belum normal.

Pandemi COVID-19 juga memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan

pendapatannya sehingga berpengaruh kepada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati dalam mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Sedangkan pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan, terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah dengan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi *supply* yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Menurut Kemenkop UMKM, ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terkena dampak sangat serius dengan adanya pandemi ini, ditandai dengan sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% permasalahan terkait dengan aspek pembiayaan, 15% melaporkan

terkait masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah yang menyebabkan kinerja UMKM menjadi menurun. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM harus mampu bersaing dalam mempertahankan eksistensinya di tengah masalah global ini. Oleh karena itu pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor terutama lembaga pemerintah.

Objek penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang. Berikut ini merupakan tabel perkembangan UMKM di Kabupaten Sumedang :

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Kabupaten Sumedang

No.	Sektor	Jumlah (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	UMKM	7.075	8.075	9.075	10.075	11.825
2.	Perkembangan UMKM (%)	-	14,13%	12,38%	11,02%	17,37%

Sumber : Disperindag Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data di atas, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan jumlah yang cukup signifikan, berdasarkan data dari Disperindag Kabupaten Sumedang pada periode 2019-2020 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 17,37% yaitu dari 10.075 unit pada tahun 2019 menjadi 11.825 unit pada tahun 2020. Adapun jika ditinjau dari jenis usahanya, UMKM yang memiliki unit usaha terbesar

adalah jenis usaha makanan dan minuman, handicraft, jasa, agribisnis, fashion dan manufaktur.

Peningkatan jumlah UMKM yang signifikan ini tidak didukung dengan kualitas pendidikan dan pengetahuan akan pengelolaan keuangan, karena pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan keterampilan akuntansi yang tidak semua pelaku UMKM dapat merealisasikannya. Begitu pula dengan perkembangan UMKM di Kabupaten Sumedang, secara umum khususnya dalam aspek finansial hanya sedikit UMKM yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja keuangannya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemahaman mengenai literasi keuangan perusahaan. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, kurangnya sarana dan prasarana baik ini maupun pendukungnya, memiliki permasalahan dalam permodalan, penggunaan teknologi yang masih rendah, bahan baku, pengelolaan keuangan serta kurangnya akses produk (Kepala Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan, 2021).

Perkembangan UMKM juga mengharuskan pelaku UMKM untuk siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini agar pelaku UMKM menciptakan usaha baru dan berbeda. Selain itu UMKM juga diharapkan memiliki kinerja yang bagus. Meskipun UMKM mempunyai peran yang potensial namun dalam kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Namun untuk mendapatkan kinerja yang optimal tidaklah

mudah, karena dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari organisasi atau perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, baik itu yang berasal dari dalam usaha tersebut maupun yang berasal dari luar kegiatan usaha tersebut. Menurut Munizu (2010) dalam Purwaningsih (2015) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM diantaranya, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, aspek pasar dan pemasaran, aspek kebijakan pemerintah, aspek peranan lembaga terkait serta aspek sosial, budaya dan ekonomi.

Menurut Yanti, dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah inklusi keuangan dan literasi keuangan. Hal ini menunjukkan apabila rendahnya pengetahuan dan pemahaman terkait inklusi dan literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM maka akan menghambat kinerja UMKM.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, maka peneliti melakukan pra-survei dengan penyebaran kuesioner pendahuluan kepada 30 responden. Pra-survei ini dilakukan agar mengetahui permasalahan dan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan kinerja UMKM di Kabupaten sumedang. Berikut ini adalah hasil pra-survei mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan pada kinerja UMKM :

Tabel 1.2
Variabel yang Bermasalah Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten
Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19

No	Variabel	Dimensi	Tingkat Kesetujuan					Jumlah Skor	Mean
			SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)		
1.	Aspek Sumber Daya Manusia	Sebelum Pandemi							
		Motivasi	8	17	5	0	0	123	4,1
		Tingkat Pendidikan Formal	3	5	11	11	0	90	3,0
		Pengalaman	1	10	17	2	0	100	3,3
		Jiwa wirausaha dan kepemimpinan	4	19	6	1	0	116	3,9
		Skor Rata-rata Aspek Sumber Daya Manusia Sebelum Pandemi							3,6
		Sesudah Pandemi							
		Motivasi	8	16	4	2	0	120	4,0
		Tingkat Pendidikan Formal	3	6	10	10	1	90	3,0
		Pengalaman	2	12	14	2	0	104	3,5
		Jiwa wirausaha dan kepemimpinan	1	15	10	4	0	103	3,4
		Skor Rata-rata Aspek Sumber Daya Manusia Sesudah Pandemi							3,5
		2.	Literasi Keuangan	Sebelum Pandemi					
Pengetahuan Keuangan	1			8	15	6	0	94	3,1
Perilaku Keuangan	1			5	12	12	0	85	2,8
Sikap Keuangan	1			8	17	4	0	96	3,2
Skor Rata-rata Literasi Keuangan Sebelum Pandemi							3,0		
Sesudah Pandemi									
Pengetahuan Keuangan	0			5	11	13	1	80	2,7
Perilaku Keuangan	1			4	12	12	1	82	2,7
Sikap Keuangan	1			6	9	14	0	84	2,8
Skor Rata-rata Literasi Keuangan Sesudah Pandemi							2,7		
3.	Aspek Teknis dan Operasional	Sebelum Pandemi							
		Kapasitas produksi	10	17	3	0	0	127	4,2
		Teknologi modern	7	15	8	0	0	119	4,0
		Pemilihan bahan baku	12	14	3	1	0	127	4,2
		Pemilihan teknologi	11	16	2	0	1	126	4,2
		Skor Rata-rata Aspek Teknis dan Operasional Sebelum Pandemi							4,2
		Sesudah Pandemi							
		Kapasitas produksi	11	15	3	0	0	125	4,2
		Teknologi modern	10	17	3	0	0	127	4,2
		Pemilihan bahan baku	13	14	2	1	0	129	4,3
		Pemilihan teknologi	11	16	2	0	1	126	4,2
Skor Rata-rata Aspek Teknis dan Operasional Sesudah Pandemi							4,2		

Dilanjutkan pada tabel berikutnya

Lanjutan tabel 1.2

No	Variabel	Dimensi	Tingkat Kesetujuan						Mean
			SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)	Jumlah Skor	
4.	Aspek Pasar dan Pemasaran	Sebelum Pandemi							
		Permintaan pasar	4	19	7	0	0	117	3,9
		Penetapan harga bersaing	8	16	5	1	0	121	4,0
		Promosi	6	14	9	1	0	115	3,8
		Saluran distribusi dan wilayah pemasaran	11	15	2	2	0	125	4,2
		Skor Rata-rata Aspek Pasar dan Pemasaran Sebelum Pandemi							4,0
		Sesudah Pandemi							
		Permintaan pasar	3	19	8	0	0	115	3,8
		Penetapan harga bersaing	3	20	7	0	0	116	3,9
		Promosi	10	15	4	1	0	124	4,1
		Saluran distribusi dan wilayah pemasaran	10	13	5	2	0	121	4,0
		Skor Rata-rata Aspek Pasar dan Pemasaran Sesudah Pandemi							3,9
5.	Inklusi Keuangan	Sebelum Pandemi							
		Akses	1	7	8	14	0	85	2,8
		Penggunaan	1	3	6	19	1	74	2,5
		Kualitas	2	6	17	5	0	95	3,2
		Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Sebelum Pandemi							2,8
		Sesudah Pandemi							
		Akses	0	5	4	21	0	74	2,5
		Penggunaan	0	3	5	19	3	68	2,3
		Kualitas	2	6	13	8	1	90	3,0
		Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Sesudah Pandemi							2,6
6.	Aspek Kebijakan Pemerintah	Sebelum Pandemi							
		Pembinaan	9	15	4	2	0	121	4,0
		Penyediaan Informasi	4	17	8	0	1	113	3,8
		Skor Rata-rata Aspek Kebijakan Pemerintah Sebelum Pandemi							3,9
		Sesudah Pandemi							
		Pembinaan	7	15	5	2	1	115	3,8
		Penyediaan Informasi	4	16	10	0	0	114	3,8
		Skor Rata-rata Aspek Kebijakan Pemerintah Sesudah Pandemi							3,8
7.	Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi	Sebelum Pandemi							
		Pendapatan Masyarakat	8	12	7	3	0	115	3,8
		Karakteristik Masyarakat	4	17	7	2	0	113	3,8
		Skor Rata-rata Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Sebelum Pandemi							3,8

Dilanjutkan pada tabel berikutnya

Lanjutan tabel 1.2

No	Variabel	Dimensi	Tingkat Kesetujuan						
			SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)	Jumlah Skor	Mean
7.	Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi	Sesudah Pandemi							
		Pendapatan Masyarakat	7	13	7	3	0	114	3,8
		Karakteristik Masyarakat	4	16	7	1	2	109	3,6
		Skor Rata-rata Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Sesudah Pandemi							3,7
Jumlah Skor = Nilai x Tingkat kesetujuan Mean = Jumlah skor : Jumlah responden (30) Skor Rata-rata = Jumlah Mean : jumlah pertanyaan									

Sumber : Hasil olah data kuesioner pra-survei oleh penulis (2021)

Berdasarkan data pra-survei di atas pada tabel 1.2, semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM mengalami penurunan setelah adanya pandemi COVID-19, terdapat dua variabel yang paling bermasalah dan mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang. Faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM berdasarkan hasil pra-survei yaitu faktor pertama literasi keuangan dengan skor rata-rata 3,0 sebelum pandemi dan 2,7 sesudah terjadinya pandemi, faktor kedua yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah inklusi keuangan dengan skor rata-rata sebelum pandemi 2,8 dan sesudah terjadinya pandemi 2,6. Dua faktor tersebut mempunyai hasil dengan rata-rata terendah dibandingkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM lainnya.

Variabel yang diduga bermasalah terhadap kinerja UMKM adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya. Masyarakat perlu diberikan kesadaran atas pentingnya literasi keuangan dalam mencapai kesejahteraan jangka panjang. Literasi mempengaruhi cara berpikir

seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang baik bagi pemilik usaha.

Dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*) pelaku UMKM akan mengetahui apa yang seharusnya diutamakan dengan uang yang dimilikinya ataupun uang yang akan dimilikinya, dan bagaimana cara menggunakan uang tersebut. Semakin baik tingkat literasi keuangan maka akan semakin baik pula pemahaman mengenai perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangannya, sehingga mampu menghadapi masalah keuangan dalam menjalankan usahanya dan akan mempermudah pelaku UMKM dalam menggunakan produk dan jasa keuangan sehingga mampu mengembangkan usahanya. Berikut hasil pra-survei yang diperoleh penulis mengenai literasi keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hasil Pra-Survei Literasi Keuangan UMKM di Kabupaten Sumedang
Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19

No.	Dimensi	Tingkat Kesetujuan					Jumlah Skor	Mean
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)		
Sebelum Pandemi								
1.	Pengetahuan Keuangan	1	8	15	6	0	94	3,1
2.	Perilaku Keuangan	1	5	12	12	0	85	2,8
3.	Sikap Keuangan	1	8	17	4	0	96	3,2
Skor Rata-rata Literasi Keuangan Sebelum Pandemi								3,0
Sesudah Pandemi								
1.	Pengetahuan Keuangan	0	5	11	13	1	80	2,7
2.	Perilaku Keuangan	1	4	12	12	1	82	2,7
3.	Sikap Keuangan	1	6	9	14	0	84	2,8
Skor Rata-rata Literasi Keuangan Sesudah Pandemi								2,7
Jumlah Skor = Nilai x Tingkat kesetujuan Mean = Jumlah skor : Jumlah responden (30) Skor Rata-rata = Jumlah Mean : jumlah pertanyaan								

Sumber : Hasil olah data kuesioner pra-survei oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, hasil pra-survei mengenai literasi keuangan secara umum memperoleh skor rata-rata 3,0 sebelum pandemi COVID-19 dan 2,7 sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Tingkat literasi di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan rendah atau kurang optimal, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 pengelolaan keuangan mengalami penurunan. Selain melakukan pra-survei, peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku UMKM bahwa literasi keuangan yang rendah disebabkan oleh ketidakmampuan atau kurangnya pengetahuan dalam hal manajemen keuangan termasuk kurangnya keterampilan dalam pembuatan anggaran, laporan keuangan dan cara mengelola keuangan yang baik karena hanya berfokus pada keuntungan. Selain itu, pelaku UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Akibatnya manajemen keuangan UMKM tidak tersusun dengan rapi dimana transaksi penjualan tidak dapat dihitung secara pasti. Dalam situasi pandemi, pemahaman mengenai literasi keuangan sangat penting untuk membangun usaha yang berkelanjutan atau mempertahankan bisnis dari kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang ini.

Dengan demikian tampak bahwa peningkatan literasi keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan yang diwujudkan melalui ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan serta ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat. Kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat digunakan secara optimal. Produk dan layanan jasa

keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Menurut Soetiono dan Setiawan (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa inklusi keuangan adalah seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat di dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Inklusi keuangan menjadi upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berikut hasil pra-survei yang diperoleh penulis mengenai inklusi keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Hasil Pra-Survei Inklusi Keuangan UMKM di Kabupaten Sumedang
Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19

No	Dimensi	Tingkat Kesetujuan					Jumlah Skor	Mean
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)		
Sebelum Pandemi								
1	Akses	1	7	8	14	0	85	2,8
2	Penggunaan	1	3	6	19	1	74	2,5
3	Kualitas	2	6	17	5	0	95	3,2
Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Sebelum Pandemi								2,8
Sesudah Pandemi								
1	Akses	0	5	4	21	0	74	2,5
2	Penggunaan	0	3	5	19	3	68	2,3
3	Kualitas	2	6	13	8	1	90	3,0
Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Sesudah Pandemi								2,6
Jumlah Skor = Nilai x Tingkat kesetujuan Mean = Jumlah skor : Jumlah responden (30) Skor Rata-rata = Jumlah Mean : jumlah pertanyaan								

Sumber : Hasil olah data kuesioner pra-survei oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, hasil pra-survei mengenai inklusi keuangan secara umum memperoleh skor rata-rata sebelum pandemi yaitu 2,8 dan sesudah terjadinya pandemi 2,6. Tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan rendah atau kurang optimal, hal tersebut terjadi karena pandemi COVID-19 memberikan tekanan bagi para pelaku UMKM, yaitu penurunan pendapatan dan beban usaha serta akses permodalan yang sulit didapatkan. Selain hasil pra-survei di atas, peneliti melakukan wawancara bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di antaranya ketidakmampuan untuk mengakses jasa keuangan, kurangnya informasi terkait pinjaman, ketidakmampuan untuk melakukan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa akses keuangan belum dapat dinikmati secara merata oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang.

Pelaku UMKM yang terpukul dengan adanya pandemi membutuhkan modal untuk bisa memulai kembali usahanya. Sebanyak 48 ribu pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang telah mengajukan bantuan Rp 2,4 juta ke pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, dari jumlah 48 ribu tersebut hanya 38 ribu yang telah memenuhi persyaratan, sehingga pelaku UMKM itu berhak mendapat bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat. Tentu ada syarat untuk bisa mendapat bantuan permodalan tersebut. Selain harus mengikuti pelatihan dengan serius, penerima bantuan permodalan diwajibkan tidak sedang menerima kredit permodalan dari lembaga keuangan lain. Hal ini

penting untuk menjaga pemerataan penerima bantuan permodalan (Kepala Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan, 2021).

Peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang erat dalam pemberdayaan konsumen. Korelasi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus atas peningkatan kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menentukan layanan jasa atau produk keuangan. Inklusi keuangan dan literasi keuangan sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM, tujuannya agar UMKM mampu menentukan pilihan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta dapat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan diantaranya ialah program edukasi keuangan, pengembangan produk atau layanan keuangan, penguatan infrastruktur dan penguatan perlindungan konsumen, untuk mencapai kinerja yang unggul dan bisnis yang berkelanjutan.

Meskipun UMKM mempunyai peranan yang strategis, tetapi dalam meningkatkan kinerja UMKM merupakan sesuatu yang tidak mudah. Kesulitan pengukuran kinerja merupakan salah satu permasalahan bagi pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja usahanya karena pelaku UMKM lebih berfokus pada kegiatan operasionalnya saja sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan

seringkali terabaikan. Ditambah lagi dengan akses pembiayaan yang sulit menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM dikarenakan lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Karena melihat dari keadaan produksi yang tidak menentu serta tingginya risiko yang dapat berdampak pada kegagalan pelunasan kredit. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti untuk memudahkan proses penelitian selanjutnya dan memudahkan dalam memahami hasil penelitian. Rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup dalam penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa fenomena yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Semakin pesatnya perkembangan UMKM tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan dan akses permodalan.

2. Pelaku UMKM seringkali tidak melakukan penilaian pada kinerja keuangan perusahaannya.
3. Pendapatan UMKM yang cenderung tidak stabil.
4. Rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan.
5. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.
6. Prosedur peminjaman kredit dari lembaga keuangan formal yang sulit didapatkan oleh UMKM.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana literasi keuangan pada UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
2. Bagaimana inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
3. Bagaimana kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
4. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19 baik secara simultan maupun secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan pemilik UMKM mengenai literasi keuangan pada UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
2. Tanggapan pemilik UMKM mengenai inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
3. Tanggapan pemilik UMKM mengenai kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandemi COVID-19 baik secara simultan maupun secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan yang

berkaitan dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam menempuh skripsi. Penelitian ini juga digunakan sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan dan saran-saran atas masalah yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Sumedang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan landasan dan juga digunakan sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang dan kajian yang sama.